

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

Nisa Juliani¹, Farah Latifah Nurfauziah², Ahmad M. Ryad³

^{1,2,3}Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

Email: nisaj337@gmail.com

Abstrak

Predikat opini audit yang baik tidak serta-merta menjamin tuntasnya seluruh persoalan pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal pencatatan aset. Studi ini diangkat dari pengalaman Pemerintah Kabupaten Garut yang, meski konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian sepanjang 2020-2024, sempat menerima catatan tambahan berupa Penekanan Suatu Hal pada tahun 2023 terkait pengelolaan peralatan dan mesin. Penelitian ini menganalisis tiga faktor yang diduga membentuk mutu laporan keuangan daerah tersebut: kepatuhan pada standar akuntansi berbasis akrual, kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, dan penggunaan teknologi informasi dalam proses pelaporan, baik dampaknya secara terpisah maupun gabungan. Melalui desain survei kuantitatif terhadap 128 aparatur dari 32 unit kerja perangkat daerah (empat orang per unit), data diolah dengan regresi berganda berbasis kuesioner berskala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut, baik satu per satu maupun secara bersamaan, berperan signifikan dalam menentukan mutu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah.

Abstract

A favorable audit opinion does not necessarily indicate that every aspect of local government financial management, including asset recording, has been fully resolved. This study draws on the experience of Garut Regency, which, despite consistently obtaining an Unqualified Opinion from 2020 to 2024, received an additional remark (an Emphasis of Matter) in 2023 concerning the management of equipment and machinery. The study investigates three factors presumed to shape local government financial reporting quality: compliance with accrual-based accounting standards, the capacity of financial management personnel, and the use of information technology in the reporting process, examining their effects both separately and jointly. Through a quantitative survey design involving 128 civil servants across 32 regional apparatus work units (four per unit), data were processed using multiple regression based on a Likert-scale questionnaire. The findings confirm that all three factors, individually and jointly, play a significant role in shaping the quality of Garut Regency's local government financial statements.

Keywords: Accrual-Based Government Accounting Standards, Human Resource Competence, Information Technology, Financial Reports, Local Government.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Garut, salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Barat, tercatat mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, sebagaimana terangkum berikut ini:

Tabel 1 Opini BPK Terhadap PemDa Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No	Tahun	Opini BPK
1	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2023	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH)
5	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2020-2024 (diolah oleh penulis)

Namun demikian, capaian tersebut bukan berarti bebas dari catatan. Pada tahun anggaran 2023, opini yang diraih bergeser menjadi Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH) status yang tetap menunjukkan kepatuhan umum terhadap kaidah pelaporan, namun disertai sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan belanja peralatan dan mesin (aset) yang keberadaannya belum sepenuhnya dapat diverifikasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun anggaran 2023. Titik lemah ini teridentifikasi di lingkungan Sekretariat Daerah, sejumlah kecamatan, dan beberapa SKPD (Radar Garut, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa mutu laporan keuangan daerah tidak semata ditentukan oleh predikat opini yang diraih, melainkan juga oleh sejauh mana proses pencatatan dan penyajian informasi keuangan terbebas dari kekeliruan baik yang bersumber dari penerapan standar akuntansi yang belum optimal, human error pegawai, maupun keterbatasan pemanfaatan sarana teknologi informasi.

Tuntutan agar kinerja pemerintah lebih transparan dan akuntabel semakin meningkat seiring pesatnya pertumbuhan lembaga publik di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, khususnya menyangkut pertanggungjawaban pengelolaan anggaran (Pirani et al., 2023). Kewenangan menyusun laporan keuangan di tingkat lokal melekat sepenuhnya pada pemerintah daerah, yang juga memikul tanggung jawab penuh atas keseluruhan proses pelaporannya. Untuk menjaga kredibilitas laporan tersebut, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan yang konsisten (Lantu et al., 2023), mengingat laporan keuangan yang bermutu akan memudahkan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan (Saputro et al., 2025). Husin (2025), dengan merujuk PP No. 71 Tahun 2010, menguraikan laporan keuangan sebagai catatan resmi yang menyajikan kondisi finansial serta seluruh transaksi suatu entitas pelapor pada rentang satu periode akuntansi tertentu.

Untuk menjaga mutu penyajiannya, PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menetapkan empat karakteristik kualitatif yang wajib dipenuhi secara konsisten, sebagaimana terangkum pada tabel berikut:

Tabel 2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010

Karakteristik	Deskripsi
Relevan	Mampu membantu pembaca laporan dalam proses pengambilan keputusan.
Andal	Disajikan secara jujur, objektif, dan bebas dari kekeliruan material yang berisiko menyesatkan pengguna.
Dapat Dibandingkan	Memungkinkan perbandingan yang konsisten antarwaktu maupun antarentitas yang menerapkan kaidah serupa.

Dapat Dipahami	Disusun dengan bahasa dan format yang mudah dicerna oleh penggunaanya.
----------------	--

Sumber: Diolah dari PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Di luar keempat karakteristik tersebut, opini yang diterbitkan BPK atas tiap daerah turut menjadi tolok ukur mutu laporan keuangan pemerintah daerah, yang terbagi ke dalam empat kategori: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Rahayu & Dewi Kanita, 2023).

Ketentuan mengenai SAP mengalami pembaruan besar ketika PP No. 24 Tahun 2005 digantikan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mewajibkan penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan (Gunawan & Sujana, 2023). Perubahan ini penting sebab SAP berlaku sebagai pedoman resmi proses akuntansi birokrasi pada seluruh jenjang pemerintahan (Hamruna et al., 2022), sekaligus menghasilkan tolok ukur kinerja yang lebih tepat serta pengelolaan modal dan aset negara yang lebih terbuka dan akuntabel. Struktur pelaporan keuangan sektor publik yang diwajibkan PP No. 71 Tahun 2010 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik menurut PP No. 71 Tahun 2010

No	Komponen Laporan
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3	Neraca
4	Laporan Operasional (LO)
5	Laporan Arus Kas (LAK)
6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Sumber: Diolah dari PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Ciri utama basis akrual terletak pada pengakuan pendapatan dan beban tepat saat peristiwa ekonominya berlangsung, tanpa menunggu perpindahan kas. Pendekatan ini menghasilkan potret yang lebih mendekati kondisi riil atas aset, liabilitas, dan riwayat keuangan pemerintah daerah (Febriana et al., 2025), sekaligus memudahkan pembaca laporan dalam menilai kapasitas pendanaan serta penyelesaian kewajiban finansial entitas publik (Pirani et al., 2023).

Selain aspek regulasi, mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga sangat bergantung pada kapasitas aparatur pengelola keuangan itu sendiri. Penyusunan laporan yang sesuai kaidah menuntut pemahaman mendalam atas tata kelola anggaran, seluk-beluk birokrasi, dan prinsip akuntansi sektor publik (Hamruna et al., 2022). Kerangka pengukuran kompetensi yang umum digunakan mencakup tiga dimensi pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap kerja (Rahmawati et al., 2022) yang secara bersama menggambarkan kesesuaian antara kapasitas individu dan tuntutan jabatannya (Setyaningdiah & Tajuddin, 2024). Gunawan dan Sujana (2023) memandang SDM sebagai kekayaan non-finansial paling berharga bagi keberlangsungan organisasi, sehingga percepatan rekrutmen aparatur yang cakap secara digital maupun manajerial menjadi kebutuhan mendesak bagi instansi pemerintah (Faisal et al., 2024).

Unsur ketiga, pemanfaatan teknologi informasi, menempati posisi penting sebagai sarana pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data keuangan (Aldino & Septiano, 2021). Pembaruan regulasi dari PP No. 56 Tahun 2005 menjadi PP No. 65 Tahun 2020, sebagaimana dicermati Ridzal (2022), mewajibkan seluruh instansi pemerintah mempercepat digitalisasi guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang valid dan berbasis data aktual, sekaligus mempercepat integrasi birokrasi (Rahayu & Kanita, 2023). Namun begitu, manfaat teknologi baru terasa optimal apabila ditopang kecukupan perangkat komputer, stabilitas jaringan internet, dan kedisiplinan proses input data sejak tahap awal (Ternalemta et al., 2021), mengingat integrasi digital yang baik terbukti meningkatkan akurasi data sekaligus kepuasan pengguna laporan keuangan (Aldino & Septiano, 2021).

Berdasarkan kerangka persoalan tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai unit amatan, dengan responden mencakup unsur pimpinan dinas/badan, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), kepala subbagian keuangan, pelaksana teknis akuntansi, serta bendahara pengeluaran dan penerimaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengukur pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap mutu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut, baik secara terpisah maupun bersamaan.

Penelitian ini berdasarkan pada tiga landasan teori berikut:

Tabel 4 Landasan Teori Penelitian

Teori	Sumber	Inti Gagasan
Teori Agensi	Jensen & Meckling (1976) dalam Pirani (2023)	Hubungan antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) diibaratkan sebagai kontrak pendelegasian wewenang, di mana agen menjalankan tugas pengelolaan sumber daya mencakup alokasi anggaran, koordinasi antarunit, penetapan biaya, hingga insentif atas nama kepentingan prinsipal.
<i>Resource-Based View</i>	Barney (2018) dalam Febriana (2025)	Sumber daya manusia diposisikan sebagai modal strategis organisasi yang, melalui pengetahuan, keahlian, dan kapasitasnya, turut membentuk daya saing institusi.
<i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	Davis (1986) dalam Hartanti (2021)	Kesediaan seseorang mengadopsi suatu teknologi banyak dipengaruhi oleh sejauh mana ia merasakan manfaat serta kemudahan dalam menggunakannya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif berbasis survei, dengan data primer berupa jawaban responden atas kuesioner berskala Likert 1–5. Unit analisis mencakup 32 SKPD Kabupaten Garut, yang dipilih melalui teknik sampling jenuh dengan kriteria responden meliputi pimpinan SKPD, auditor internal, kepala bagian keuangan, bendahara SKPD, dan staf keuangan. Prosedur pengujian statistik yang ditempuh dalam penelitian ini tersaji berikut:

Tabel 5 Tahapan Pengujian Instrumen dan Hipotesis Penelitian

Tahapan Pengujian	Tujuan	Kriteria Keputusan
Uji Validitas	Menilai keabsahan tiap butir kuesioner	Butir dinyatakan sah bila r hitung melampaui r tabel; sebaliknya dinyatakan gugur (Ghazali, 2021)
Uji Reliabilitas	Menilai konsistensi internal kuesioner	Dinyatakan andal bila koefisien Cronbach's Alpha melebihi 0,70 (Ghazali, 2021)
Uji Normalitas	Memeriksa pola sebaran residual model	Dinyatakan berdistribusi normal bila signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov melampaui 0,05
Uji Multikolinearitas	Memeriksa korelasi berlebih antarprediktor	Dinyatakan bebas gejala bila VIF di bawah 10 dan tolerance di atas 0,10
Uji Heteroskedastisitas	Memeriksa kestabilan varians residual	Dinilai dari pola sebaran titik pada grafik scatterplot (Ghazali, 2021)

Uji t (Parsial)	Menilai kontribusi tiap prediktor secara individual	Dinyatakan berpengaruh bila signifikansi t kurang dari 0,05
Uji F (Simultan)	Menilai kontribusi gabungan seluruh prediktor	Dinyatakan berpengaruh bila signifikansi F kurang dari 0,05 pada taraf 5% (Ghazali, 2021)
Uji Koefisien Determinasi (R^2)	Menilai daya jelas model terhadap variabel terikat	Dinyatakan dalam bentuk persentase kontribusi variabel bebas

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Total 128 aparatur berpartisipasi sebagai responden penelitian ini, meliputi pimpinan SKPD, auditor internal, kepala subbagian keuangan, bendahara SKPD, dan staf keuangan. Proporsi laki-laki (65 orang) sedikit lebih dominan dibanding perempuan (63 orang). Ditinjau dari usia, mayoritas responden (109 orang) berada di atas 35 tahun, dari jenjang pendidikan, mayoritas (95 orang) menempuh S1, dan dari masa kerja, mayoritas (99 orang) telah mengabdikan lebih dari 10 tahun.

2. Uji Instrumen Penelitian

Keabsahan instrumen diuji dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel, yang diperoleh dari perhitungan $df = n-2 = 128-2 = 126$ pada taraf 5%, menghasilkan r tabel sebesar 0,173. Karena seluruh nilai r hitung yang diperoleh melampaui angka tersebut, seluruh butir kuesioner dinyatakan sah. Selanjutnya, keandalan instrumen diuji dengan syarat *Cronbach's Alpha* melampaui 0,70, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach Alpha	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	0,952	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,945	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,938	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	0,943	Reliabel

Sumber: Hasil SPSS Diolah Penulis, 2026

Sebagaimana tersaji pada Tabel 6, seluruh variabel baik pada kelompok prediktor maupun variabel terikat memenuhi syarat keandalan tersebut.

3. Uji Asumsi Klasik

Kenormalan sebaran residual diuji melalui metode 1-Sample Kolmogorov-Smirnov, menghasilkan keluaran berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

Item	Rincian	Unstandardized Residual
N	-	105
Normal Parameters	Mean	-0,5568749
	Std. Deviation	1,45161453
Most Extreme Differences	Absolute	0,083
	Positive	0,079
	Negative	-0,083
Test Statistic	-	0,083
Asymp. Sig. (2-Tailed)	-	0,071

Sumber: Hasil SPSS Diolah Penulis, 2026

Setelah 23 data ekstrem disingkirkan dari 128 data awal, tersisa 105 data yang diuji lebih lanjut. Nilai signifikansi 0,071 yang diperoleh melampaui ambang 0,05, sehingga residual model dinyatakan menyebar normal.

Pemeriksaan berikutnya dilakukan uji multikolinearitas antarprediktor, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

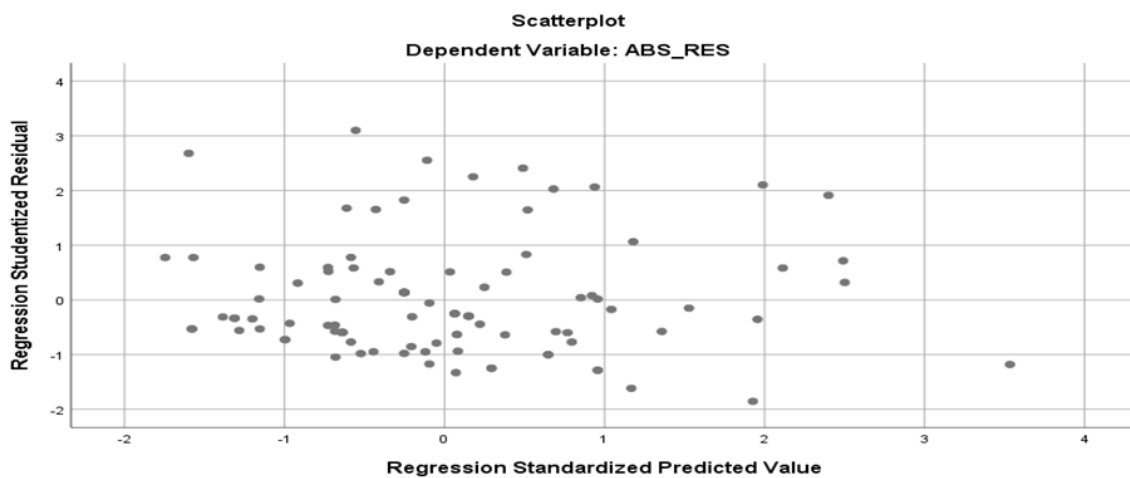
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	3,460	1,546	-	2,239	0,027	-	-
PSAPBA	0,100	0,023	0,286	4,315	0,000	0,357	2,802
KSDM	0,286	0,052	0,357	5,462	0,000	0,366	2,733
PTI	0,380	0,059	0,375	6,400	0,000	0,456	2,194

a. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Hasil SPSS Diolah Penulis, 2026

Nilai VIF pada ketiga prediktor (X_1 , X_2 , X_3) seluruhnya berada di bawah ambang 10, diiringi tolerance di atas 0,10 indikasi bahwa model bebas dari korelasi berlebih antarvariabel bebas.

Kestabilan varians residual selanjutnya diperiksa secara visual melalui pola titik pada plot berikut:



Gambar 1 Grafik Scatterplot

Sumber: Hasil SPSS Diolah Penulis, 2026

Sebaran titik yang tampak acak dan tanpa pola tertentu mengindikasikan model regresi ini terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Estimasi koefisien parsial (uji t) melalui perangkat lunak SPSS menghasilkan rincian berikut:

Tabel 9 Hasil Uji t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	3,460	1,546	-	2,239	0,027
PSAPBA	0,100	0,023	0,286	4,315	0,000
KSDM	0,286	0,052	0,357	5,462	0,000
PTI	0,380	0,059	0,375	6,400	0,000

a. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Hasil SPSS Diolah Penulis, 2026

Seluruh prediktor menunjukkan signifikansi 0,000, jauh di bawah ambang 5%. Ringkasan keputusan atas hipotesis parsial tersaji berikut:

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial

Hipotesis	Pengaruh yang Diuji	Sig.	Keputusan
H ₁	Kepatuhan pada SAP berbasis akrual (X_1) memengaruhi kualitas LKPD (Y)	0,000	Diterima

H ₂	Kompetensi sumber daya manusia (X ₂) memengaruhi kualitas LKPD (Y)	0,000	Diterima
H ₃	Pemanfaatan teknologi informasi (X ₃) memengaruhi kualitas LKPD (Y)	0,000	Diterima

Perspektif teori agensi menempatkan pemerintah sebagai pihak yang dipercaya mengelola sumber daya publik atas nama masyarakat, sehingga wajib mempertanggungjawabkannya melalui laporan yang tertib dan sesuai kaidah. Nilai signifikansi 0,000 pada H1 memberi dukungan empiris atas kerangka tersebut: konsistensi Pemerintah Kabupaten Garut dalam menerapkan basis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 berbanding lurus dengan mutu laporan yang dihasilkan. Pola ini senada dengan simpulan Gunawan dan Sujana (2023), Muntu dkk. (2024), dan Husin dkk. (2025) pada konteks daerah yang berbeda. Menariknya, catatan BPK dalam LHP LKPD 2023 justru berpusat pada persoalan pencatatan aset, bukan pada penerapan basis akrual itu sendiri sinyal bahwa kelemahan yang tersisa cenderung bersifat teknis-operasional, bukan kegagalan menyeluruh dalam menjalankan standar akuntansi.

Angka signifikansi 0,000 pada H2 memperlihatkan keterkaitan nyata antara kompetensi aparatur dan mutu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam bingkai Resource-Based View, kapasitas sumber daya manusia yang tercermin lewat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja berperan sebagai modal strategis penggerak efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Data demografis responden turut memperkuat argumen ini: sebagian besar (99 orang) telah bertugas lebih dari sepuluh tahun dan mayoritas (95 orang) berlatar S1, kombinasi yang lazimnya berasosiasi dengan pemahaman akuntansi sektor publik yang lebih mumpuni. Simpulan ini konsisten dengan Mitjo dkk. (2022), Ridzal dkk. (2022), dan Gunawan serta Sujana (2023), yang sama-sama menempatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai penentu utama mutu pelaporan keuangan daerah.

Kerangka *Technology Acceptance Model* menjelaskan bahwa kesediaan seseorang memanfaatkan teknologi banyak ditentukan oleh persepsi kegunaan dan kemudahannya. Hasil H3 (signifikansi 0,000) mengafirmasi pola tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut: makin optimal penggunaan teknologi informasi oleh aparatur, makin andal pula laporan keuangan yang tersaji. Temuan Aldino & Septiano (2021), Ridzal dkk. (2022), serta Rahayu & Kanita (2023) menunjukkan kecenderungan sejalan di berbagai daerah lain. Secara praktis, hasil ini pun relevan dengan sorotan BPK atas lemahnya verifikasi data aset di Kabupaten Garut kendala yang berpeluang diatasi lewat digitalisasi pencatatan dan pembaruan berkala sistem informasi aset.

Pengujian gabungan (uji F) menghasilkan keluaran berikut:

Tabel 11 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1147,995	3	382,665	179,053	0,000
Residual	215,853	101	2,137		
Total	1363,848	104			

a. Dependent Variable: KLKPD

b. Predictors: (Constant), PTI, KSDM, PSAPBA

Sumber: Hasil SPSS Diolah Penulis, 2026

Nilai signifikansi 0,000 menegaskan bahwa ketiga prediktor secara serentak turut memengaruhi mutu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut, sehingga H4 turut dinyatakan diterima.

Daya jelas model terhadap variasi variabel terikat tercermin dari koefisien determinasi berikut:

Tabel 12 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,917	0,842	0,837	1,462

a. Predictors: (Constant), PTI, KSDM, PSAPBA

b. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Hasil SPSS Diolah Penulis, 2026

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa 84% variasi mutu laporan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh ketiga prediktor dalam model ini, sedangkan 16% sisanya dipengaruhi faktor di luar cakupan penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi, kompetensi, dan teknologi bekerja secara komplementer: regulasi tanpa SDM yang mumpuni rentan disalah tafsirkan; SDM yang mumpuni tanpa sistem informasi memadai rentan lambat dan rawan kekeliruan manual; sementara sistem informasi tanpa payung regulasi yang jelas berisiko menghasilkan keluaran yang sulit dipertanggungjawabkan. Keterkaitan ketiganya sejalan dengan teori agensi, yang menegaskan kewajiban agen mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada prinsipal melalui pelaporan yang bermutu, dan diperkuat oleh temuan Gunawan & Sujana (2023), Mitjo, Kawatu & Tangkau (2022), serta Rahayu & Kanita (2023).

D. KESIMPULAN

Rangkaian pengujian dalam penelitian ini menegaskan bahwa mutu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling mengisi. Pertama, konsistensi penerapan basis akrual terbukti berkontribusi terhadap keandalan dan kewajaran laporan yang dihasilkan. Kedua, kapasitas aparatur yang dalam penelitian ini didominasi pegawai berpengalaman dan berlatar S1 berperan penting dalam menjaga akurasi serta akuntabilitas informasi finansial. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi membantu menekan risiko human error, terutama dalam pencatatan dan verifikasi data aset titik lemah yang secara spesifik disoroti BPK dalam LHP LKPD Kabupaten Garut tahun anggaran 2023. Secara bersamaan, ketiga faktor ini menjelaskan 84% variasi mutu laporan keuangan daerah, menegaskan bahwa keandalan pelaporan sektor publik hanya dapat tercapai melalui sinergi kepatuhan regulasi, profesionalisme aparatur, dan digitalisasi sistem pencatatan. Merujuk pada temuan ini, penelitian mendatang disarankan memperluas cakupan sampel ke wilayah lain untuk menguji konsistensi model, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti pengendalian internal atau pengawasan aset guna menjawab persoalan spesifik yang masih disoroti BPK, terutama terkait pengelolaan peralatan dan mesin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, H. P., & Septiano, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(2).
- Faisal, Y., Indriyani, I., Mayang, T., & Muhamad, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 12(1), 176-185.
- Febriana, L., Mahmud, M., & Mauzu, F. (2025). Pengaruh Pengawasan Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 437-448. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1652>
- Ghazali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gunawan, A., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha*, 14(03).
- Hamruna, I., Muhammad, Z., & Thaher, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(10), 739-745.
- Hartanti, L. P. S. (2021). Pendekatan Technology Acceptance Model Dalam Analisis Penerimaan Teknologi (Studi Kasus Pada Pengguna Mobile Payment). *Buletin Profesi Insinyur*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.20527/Bpi.V4i1.91>
- Lantu, F. T., Pangkey, R. I. J., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *JAİM: Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1).
- Pirani, F., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Radar Garut. (2025). *Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut 2023*. Diakses dari: <https://radargarut.id/2025/07/25/senilai-rp81-miliar-aset-di-garut-jadi-temuan-bpk-keberadaannya-tak-diketahui/>
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi kasus pada organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi DKI Jakarta tahun 2022). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 423-432. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Peran sistem pengendalian internal sebagai pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 346-359. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner*, 6(3), 2944–2954. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Saparuddin, S. Y., & Purnaman, S. M. N. (2025). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 44-57.
- Saputro, H. G., Aditya, E. M., & Indarti, I. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Aset*, 27(1), 39-47. <https://doi.org/10.37470/1.27.1.250>
- Setyaningdiah, E., & Tajuddin, M. (2025). *Kompetensi Sumber Daya Manusia di Era Teknologi Digital*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).